



Judul : Kasus E-KTP : Novanto Dotantang "Nyanyi"
Tanggal : Minggu, 17 Desember 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 & 7

KASUS E-KTP

Novanto Ditantang "Nyanyi"

RAIBNYA sejumlah nama politisi PDIP dalam dakwaan Setya Novanto menuai pertanyaan besar. Untuk mengungkapnya, sejumlah pihak menantang bekas ketua DPR ini untuk nyanyi.

Dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, kemarin pagi, tiga dari lima narasumber yang hadir: Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Waketum DPP Partai Gerindra Feri Juliantono, Wasekjen DPP Partai Golkar, Dave Laksmono, meminta Novanto nyanyi.

"Kita berharap Pak Setnov dapat hidayah dari Allah agar dia mau mengungkap siapa saja yang terlibat di kasus e-KTP, jangan cuma Setnov sendirian," tutur Emerson dalam dis-

kusi bertajuk 'Setnov Effect!' itu.

Emerson sendiri menilai, hilangnya nama-nama dalam dakwaan bukan berarti nama itu sudah pasti tidak terlibat. Sebab menurutnya, pengusutan kasus e-KTP masih panjang. Ibarat sepakbola, ini baru babak penyisihan. "Kalau hilangnya nama-nama itu di berkas dakwaan, kan bisa muncul di fakta-fakta persidangan. Artinya belum kiamat," tegasnya. "Nama-nama yang belum muncul bukan berarti tak terlibat. Proses masih panjang."

Nah, Emerson melihat, inilah kesempatan bagi Novanto untuk terbuka dalam membeberkan kasus

◆ BERSAMBUNG KE HAL 9



KPK Dituding Mainkan Politik Belah Bambu

Novanto Ditantang

... DARI HALAMAN 1

korupsi tersebut. "Kalau Pak Novanto mau buka, masih ada kesempatan se-luas-luasnya," ujar Emerson.

Senada, Ferry Juliantono menyebut, bola kasus korupsi e-KTP berada di tangan Setya Novanto. Eks Ketum Golkar itu dinilai tahu betul siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. "Sekarang posisinya tinggal ada di Pak Setnov. Bolanya ada di Pak Setnov," kata Feri.

Namun, Feri menyatakan, bukan tanpa risiko jika Novanto nekad "nyanyi". Risiko terberatnya, dia bisa dicelakai, atau bahkan dibunuh.

"Menurut saya risikonya ke sana, karena cuma dia satu-satunya yang bisa mengungkap kasus ini," ujar Ferry. "Kita mengharapkan Pak Novanto berani," imbuhnya.

Ferry melihat ada ketidakadilan dalam perkara Novanto dengan hilangnya nama-nama politikus PDIP dalam dakwaannya. Hal itu memunculkan persepsi seolah Novanto bertindak sendirian di DPR.

"Padahal semua tahu mekanisme alokasi anggaran DPR melalui perse-

tujuan Komisi, Banggar dan sebagainya. Lucu, korupsi kok hanya sendirian. Banggar ada Pak Olly (Dondokambey), Ketua Komisi Ganjar (Pranowo)," tegasnya.

Dave Laksono juga punya harapan yang sama dengan Emerson dan Ferry; Novanto berani "nyanyi". "Pak Novanto buka semuanya. Pasti ada yang pahit akan tetapi dengan begitu keadilan ditegakkan, kebenaran dibuka dan masyarakat bisa Indonesia yang akan merasakan semuanya," pinta Dave.

Menurut Dave, ini tak lepas dari hilangnya nama-nama politikus PDIP dalam dakwaan Novanto. Menurutnya, dengan hilangnya nama-nama itu, kasus ini dibebankan kepada Novanto dan Partai Beringin.

"Jangan hanya Pak Novanto dan Golkar yang kena. Kenapa saya mengatakan begitu, karena dalam dakwaannya disebutkan nama-nama tokoh partai lain yang sekarang ada yang menjabat sebagai menteri dan gubernur," tegasnya. Dave pun meminta KPK bekerja profesional dan transparan dalam mengungkap kasus ini. "Jadi jangan ada tutup-tutupan," tandasnya.

Tantangan ketiga orang ini ditanggapi pengacara Novanto, Maqdir Ismail. Dia menyatakan, kliennya belum tentu

mau "nyanyi". Bukan karena apa-apa, tetapi lantaran Novanto dianggapnya tak tahu menahu soal kasus ini.

"Disuruh nyanyi, tapi dia nggak tahu apa-apa. Saya khawatir beliau itu tidak punya pengetahuan. Mudah-mudahan saya salah, bahwa beliau tidak punya pengetahuan yang cukup. Kalau berharap banyak dari Pak Novanto saja, saya tidak yakin," ujar Maqdir dalam diskusi yang sama. Menurutnya, yang bisa membuka terang kasus ini justru adalah para pengusaha yang terlibat dalam proyek e-KTP.

Maqdir juga mengomentari hilangnya nama para politisi PDIP dalam dakwaan kliennya. Dia menuding, KPK memainkan "politik belah bambu"; ada pihak yang diinjak dan pihak lain diangkat.

Pihak yang diinjak adalah Novanto. Sementara yang diangkat adalah tiga politisi PDIP yang sebelumnya disebut menerima uang dalam dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto dan disebut menerima uang, dan hilang dalam dakwaan Novanto.

Ketiganya adalah Menkumham Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Yasonna dan Ganjar menjadi anggota Komisi II

DPR saat proyek e-KTP dilaksanakan. Sedangkan Olly merupakan anggota Badan Anggaran DPR.

Padahal, menurut Maqdir, jika Novanto disebut didakwa bersama-sama dengan pihak lain, seharusnya rangkaian fakta yang diuraikan sama antara masing-masing terdakwa. "Kalau tidak sama artinya dakwaan ini tidak benar," tandasnya.

Pembicara lain dalam diskusi itu, yakni mantan Hakim Asep Iwan Iriawan, juga menyakini, Novanto tak sendirian menikmati aliran dana korupsi proyek e-KTP itu. "Saya harap buka dong ini semua. KPK jangan hanya garang sama Setya Novanto, tapi garang terhadap yang lain," tegasnya. "Ada yang lebih gede sebenarnya."

Setidaknya, menurut Asep, KPK bisa menindaklanjuti sejumlah politisi dan birokrat yang pernah muncul dalam dua surat dakwaan sebelumnya itu. "Misal yang sekarang sudah jadi gubernur, sebut saja Ganjar, dia sudah nyangkal, tapi KPK harus cari buktinya. Atau menteri Yasonna, bendahara sebelah (Olly). Dengan tidak disebut namanya, bukan berarti dia tidak bisa naik status. Karena di perkara ada begini, perkara dilakukan oleh siapa dengan siapa," tandasnya. ■ OKT